



Literature Review : Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Terhadap Efektivitas Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pasien Rawat Jalan Dan Inap

Literature Review : Analysis Of Health Policy Implementation on the effectiveness of regional public hospital organizations in improving outpatient and in-patient services

Jesi Wanda Harahap^{1*}, Ananda Nurmaidani Laoli², Seri Rahmadani Hasibuan³, Sri Hajijah Purba⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jesiwanda1@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, anandalaoli06@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serirahmadanihasibuan536@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, srihajijah20@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: jesiwanda1@gmail.com

Artikel Review

Article History:

Received: 8 May, 2024

Revised: 17 July, 2024

Accepted: 9 August, 2024

Kata Kunci:

Jaminan Kesehatan;
Kebijakan Kesehatan;
Implementasi

Keywords:

Health Insurance;
Health Policy;
Implementation.

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5617](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5617)

ABSTRAK

Masalah pelayanan pasien rawat jalan dan inap merupakan masalah yang sangat urgent karena dalam penanganan dan pengelolaannya memerlukan keterampilan kecekatan bahkan biaya peralatan medis yang tinggi. Karena itu pelayanan pasien rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Umum Daerah yang lebih efektif merupakan suatu keharusan. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah, ternyata pelayanan pasien rawat jalan dan inap masih belum efektif, ini berarti pelayanan pasien rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Umum Daerah belum sepenuhnya efektif. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan kesehatan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta mengacu pada teori implementasi kebijakan yang mempunyai empat komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat komponen dari teori implementasi kebijakan menjadi pilihan dalam mendampingi penelitian ini, serta sekaligus merupakan sub variabel bebas dari studi ini. Dalam penelitian ini ditentukan populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling dengan ukuran sampel 122. Data primer diperoleh dengan menggunakan angket yang dirancang sesuai dengan keperluan penelitian dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi rumah sakit umum daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap. Di lain pihak faktor disposisi atau sikap para pelaksana memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap efektivitas organisasi rumah sakit umum daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap.

ABSTRACT

The problem of outpatient and inpatient services is a very urgent problem because handling and management requires dexterity skills and even high costs of medical equipment. Therefore, more effective outpatient and inpatient services at Regional General Hospitals are a must. General Regions have not been fully effective. This study aims to examine how the implementation of health policies and the extent to which they affect the effectiveness of the Regional General Hospital organization in improving outpatient and inpatient services. This research uses descriptive analysis research method using a quantitative approach and refers to the theory of policy implementation which has four components, namely communication, resources, position or attitude of the implementers and bureaucratic structure. The four components of the policy implementation theory are options in accompanying this research, as well as being the independent sub-variables of this study. In this study, the population was determined and the sample of this study were employees of the Regional General Hospital. The samples were taken using proportional random sampling with a sample size of 122. Primary data were obtained using a questionnaire designed in accordance with the research and observation needs. Secondary data were obtained through documentation study. The results of this study indicate that the implementation of health policies has a significant effect on the organizational effectiveness of the Regional General Hospitals in improving outpatient and inpatient services. On the other hand, the disposition factor or the attitude of the implementers has an insignificant influence on the effectiveness of the Daerah General Hospital organization in improving outpatient and inpatient services.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam menunjang dan menjaga kelangsungan proses pembangunan yang berperan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memelihara kesehatan masyarakat tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai institusi memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan perannya yang strategis ini, rumah sakit perlu dilengkapi dengan berbagai kebijakan yang mengatur bagaimana melindungi rumah sakit sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Ini berarti keterpaduan dan kontinuitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat dapat terjaga.

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai ujung tombak dan pelaksana dari berbagai kebijakan yang menyangkut pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam prakteknya selalu mengacu pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri. Kenyataan yang ada di kedua daerah tersebut menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah, dapat dikatakan sebagai institusi yang memiliki posisi “non rivalry” sehingga bagi masyarakat merupakan pilihan satu-satunya untuk memperoleh jasa pelayanan kesehatan. Seorang pasien atau keluarga yang berkunjung ke rumah sakit pada dasarnya bertujuan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Mereka datang ke rumah sakit mengharapkan pelayanan kesehatan yang baik dalam arti tidak dibatasi oleh waktu datang, siang atau malam. Datangnya mereka ke rumah sakit bertujuan untuk mengobati penyakit yang sifat penyakitnya itu ringan sehingga pasien itu disebut pasien rawat jalan atau pengobatan yang sifatnya berat dan diperlukan perawatan yang kontinu, pasien ini disebut pasien rawat inap, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan sasarannya adalah pasien rawat inap dengan alasan sebagai berikut; pelayanan terhadap pasien rawat inap relatif lebih lama dan kesan yang dirasakan oleh pasien dalam hal melayaninya lebih dirasakan oleh pasien itu sendiri sehingga ia dapat menilai lebih objektif dalam hal pelayanannya.

Selain itu untuk melayani pasien rawat inap diperlukan berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang kompleks dan unik sesuai dengan kondisi pasien itu sendiri. Pelayanan terhadap pasien rawat inap memiliki peluang untuk menciptakan kemandirian dan lebih profesional dalam hal yang menyangkut kualitas pelayanan. Baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap pertama kali yang ingin ia temui adalah tenaga kesehatan seperti; dokter, perawat, laboran dan tenaga teknis kesehatan yang bertugas digaris depan (front line). Jadi dengan demikian para pegawai yang melayani langsung kebutuhan pasien yang datang ke rumah sakit berperan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada pasien. Pasien kecewa bila orang-orang tidak memperoleh pelayanan yang tidak semestinya. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah.

METODE

Desain kuantitatif dan deskriptif survey merupakan desain penelitian yang digunakan peneliti dengan maksud untuk menjelaskan dan menguraikan tingkat keterpengaruhan variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel terikat (dependent variabel). Desain kuantitatif dan deskriptif survey adalah penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari responden dengan menggunakan angket dari sampel yang mewakili seluruh populasi supaya dilakukan pembuatan generalisasi untuk populasi. Sifat penelitiannya eksplanatory dengan tipe kausal karena peneliti akan menggali, mengidentifikasi dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan kesehatan

terhadap efektivitas pelayanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (Suatu Kasus di Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya dan Banjar), terutama perhatiannya pada sub-sub variabel penentu implementasi kebijakan tersebut. Karena sub variabel implementasi kebijakan menjadi pertimbangan digunakannya desain kuantitatif, yang terdiri dari; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, berikut dimensinya yang akan diukur dengan menggunakan statistika. Data hasil penelitian diuji sesuai tidaknya dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitiannya. Keberadaan data penelitian digunakan sebagai ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel sehingga dilakukan pengujian kausalitas dari sub-sub variabel dan dimensi-dimensi terhadap variabel terikat. Analisis yang digunakan peneliti yakni analisis regresi linier multipel yang dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur (Part Analysis).

HASIL

Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
(EniIslawati,Usman, Makhrajani Majid,2020)	Analisis Penerapan Kebijakan Kesehatan Spesifik Patient Safety Di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah terlibat dalam proses komunikasi, termasuk staf apotek puskesmas, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pertanggungjawaban program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (PBJS), dan pasien yang menerima perawatan di fasilitas tersebut dan diberikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Mendapatkan kartu BPJS diprioritaskan dalam indikator standar dan ukuran kebijakan publik. Selain itu, fasilitas infrastruktur masih belum memadai dalam hal sumber daya dan insentif yang tersedia. Oleh karena itu, hubungan antara organisasi berkualitas tinggi. Variasi pembayaran dari pemegang kartu BPJS menunjukkan adanya sedikit kekurangan	Jurnal: Manusia Dan Kesehatan Vo.3,No 3 z September 2020

		<p>atribut lembaga pelaksana. Selain itu, politik, sosial, dan suasana di mana pemerintah bertindak menawarkan layanan berkualitas. Selanjutnya, kita melihat tanggapan pelaksana atau indikator disposisi, di mana mereka memiliki sikap positif dan komitmen yang kuat untuk menerapkan kebijakan.</p>	
<p>(Nur Sri Atik , Sri Achadi Nugraheni,Kusyogo Cahyo 2020)</p>	<p>Analisis Implementasi Program Perawatan Metode Kanguru (PMK) Dan Partisipasi Pasien Pada Pelayanan Kesehatan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi pada Pasien di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus)</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dari beberapa informan utama dan informan triangulasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan atau implementasi program PMK belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan program ini hanya sebatas pemberian informasi dalam bentuk pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasien menjelang pasien pulang. Dari hasil analisis diketahui juga bahwa implementasi yang belum optimal bisa terjadi karena jumlah tenaga yang telah mengikuti pelatihan PMK juga terbatas. Kekurangan staf yang terampil merupakan masalah utama dalam program-program baru yang membutuhkan keahlian. Ruang lingkup dalam staf ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman terhadap tujuan, dan kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.</p>	<p>Jurnal:Manajemen Kesehatan Volume: 4, Nomor 02 Tahun: Juni 2020</p>

(Agus Riswandi,2020)	Implementasi Kebijakan Pelayan Kesehatan Tradisional Terhadap Pelayan Kesehatan di Puskesmas Integrasi Penyelenggaraan Tradisional di	Dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kesehatan kepada masyarakat, maka satu-satunya upaya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada. Layanan kesehatan selama ini yang bersifat kedokteran konvensional, akhir-akhir ini sudah mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut adalah dengan diintegrasikannya terapi kesehatan tradisional ke dalam terapi layanan kesehatan konvensional. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang dilakukan dalam hierarki status jabatan di puskesmas, para praktisi melakukan integrasi layanan yang disesuaikan dengan kenyataan di masyarakat. Meski hidup di era modern, masyarakat sudah mengenal dan memanfaatkan beberapa pengobatan tradisional. Dengan demikian, para pembuat kebijakan telah menetapkan peraturan untuk menelaraskan pelayanan kesehatan tradisional yang masih dibutuhkan warga dalam layanan kesehatan di puskesmas.Pelayanan kesehatan merupakan sebuah upaya untuk	Jurnal:Kehumasan Volume: 3, Nomor 1 Tahun: 2020 Halaman:71-92
----------------------	---	---	--

		<p>meningkatkan kesehatan baik itu kesehatan secara perorangan, kelompok, maupun publik atau masyarakat. Terdapat beberapa definisi mengenai pelayanan kesehatan, diantaranya menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2009 dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan k 9 kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.</p>	
<p>(Albertus Sunuwata,Laksono Trisnantoro,2019)</p>	<p>ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS DI KABUPATEN KULON PROGO (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas</p>	<p>Beberapa Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sudah bisa mencukupi kebutuhan operasionalnya tanpa tergantung subsidi dari Pemda, namun untuk pencairan dananya sering kali tidak tepat waktu karena masih</p>	<p>Jurnal: Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume: 3, Nomor 3 Tahun:September 2019 Halaman: 124-137</p>

	Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo)	<p>terkendala alur birokrasi. Alur birokrasi yang terlalu panjang dan tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana menghambat kelancaran pelayanan pada puskesmas. Penerapan kebijakan BLUD Puskesmas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Puskesmas BLUD, dana/pendapatan puskesmas bisa digunakan langsung untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa disetor ke pemda, sehingga bisa memotong rantai birokrasi pemda dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif, dan efisien dan siap menyongsong diberlakukannya program BPJS Tahun 2014. Dibutuhkan peran stakeholder dan suasana di puskesmas yang mendukung kesiapan penerapan kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</p>	
--	--	---	--

(Prayoga, Firmansyah, Tivanny 2024)	Ardi and IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG	Menurut penelitian, Rumah Sakit Kota Tanjung Pinang melakukan pekerjaan yang layak dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional. Sementara standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antarorganisasi merupakan aspek yang kurang menguntungkan, kualitas badan pelaksana, iklim sosial ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana adalah aspek terbaik	Jurnal: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Volume: 2, Nomor 4 Tahun: 2024 Halaman: 265–271
-------------------------------------	--	---	---

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kesehatan, ternyata faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas organisasi rumah sakit umum daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap artinya secara simultan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi memberikan kontribusi terhadap efektifitas organisasi rumah sakit umum daerah dalam meningkatkan pelayanan pasien rawat jalan dan inap.

SARAN

Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan kesehatan yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitas. libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, pasien dan manajemen RSUD, dalam proses pembuatan dan evaluasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Marsono. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2009.

Nugroho R. Public Policy Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan

Warmling, L., & Souza, P. A. De. (2018). The Importance of Communication among the Members of the Nursing Team. 993–999. <https://doi.org/10.4236/ce.2018.960>

Situmorang, Yuniati. Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Dan
Peran Sentra P3T. Dit Bina Yankes Tradkom Kementerian Kesehatan RI.

Foremont Kast & James Rosenweight, 1979. Organization and Manajemen A System Contingensi dan Approach. Amerika Serikat. Mc Graw Hill.